

Pendahuluan

Sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam beberapa periode dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama revolusi fisik tahun 1945-1949, dilanjutkan saat ditetapkannya sistem pemerintahan serikat (RIS) pada tahun 1949-1950. Hubungan sipil-militer ada sejak berdirinya organisasi militer di Indonesia. Perbedaan ideologi tentang cara berjuang untuk mencapai kemerdekaan sudah terjadi antara para politisi sipil dengan para pejuang yang berjuang secara militer. Adanya perbedaan pandangan pula yang membuat tidak segera dibentuknya angkatan bersenjata setelah kemerdekaan Indonesia dapat diraih. Sehingga para anggota militer terus mendesak pemimpin negara untuk segera membentuk suatu organisasi militer yang solid.

Perubahan konstitusi di pemerintahan membawa berbagai dampak bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada bidang militer yang mengakibatkan menurunnya peran politik militer, bahkan menghendaki militer tidak boleh ikut campur dalam bidang politik.¹

Pada masa awal diterapkannya sistem serikat di Indonesia ini ada usaha-usaha dari beberapa politisi nasional untuk menduduki militer di bawah supremasi sipil atau *Civil Superemacy Beyond Military*.² Selama masa RIS ada usaha dari politisi sipil untuk membuat militer hanya sekedar alat pertahanan saja seperti di negara barat khususnya sewaktu pelaksanaan sistem pemerintahan serikat di Indonesia, tanpa diberi peran aktif dalam urusan politik yang sudah mereka raih sebelumnya. Bersamaan dengan itu ada usaha besar untuk mentransformasikan Angkatan Bersenjata yang profesional.³

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis. Dalam metode sejarah kritis, penulis dituntut untuk bersikap kritis dari awal hingga akhir penelitian agar menghasilkan karya yang *kredibel*.⁴ Metode sejarah kritis terdiri atas empat tahapan, yaitu mengumpulkan sumber (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), interpretasi, dan penulisan kisah sejarah (*historiografi*).⁵ Sumber sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini tidak ditemukan sumber primer yang penulis anggap layak sebagai sumber primer. Maka penulis menggunakan sumber-sumber sekunder yaitu buku-buku yang dianggap relevan dengan tema yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer di Indonesia.

¹ Arif Yulianto, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di tengah Pusaran Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 219

² Bilveer Singh, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-Usul Akulturasi dan Implikasinya bagi Stabilitas Pembangunan*. Singapore: Institute of Internasional Affairs, 1995, hlm. 38.

³ *ibid*, hlm. 82.

⁴ Djumarwan, *Relevansi Metodologi antara Ilmu Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial*, *Jurnal Informasi No.2 Th. XXII, Mei 1994*, hlm. 2.

⁵ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dalam Penulisan Sejarah*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971, hlm. 17.

Pembahasan

Kemerdekaan yang dicapai Indonesia tidak lepas dari peran generasi muda yang umumnya termanifestasikan dari golongan-golongan atau kelompok bersenjata bentukan Jepang, seperti Pembela Tanah Air (PETA), Barisan Pelopor, *Seinendan*, *Keibodan*, dan *Heiho*. Kelompok bersenjata barisan Jepang itu adalah embrio dari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti sekarang ini. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu mereka mewariskan kepada Indonesia sejumlah laskar-laskar bersenjata, yang dimana kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh orang-orang lokal. Dengan mengabaikan hierarki militer yang akan memainkan peran menentukan dalam militer dan politik Indonesia untuk dua generasi selanjutnya. Pemimpin-pemimpin militer yang dilatih oleh Jepang inilah yang akan mengawali Revolusi Indonesia yang pecah dalam periode 1945-1949.⁶

Setelah diraihnya kemerdekaan Indonesia, perkembangan organisasi militer di Indonesia mulai saat dibentuknya BKR yang merupakan cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. akan tetapi pembentukan BKR dirasa belum cukup tepat oleh para anggota militer sebagai suatu organisasi militer yang solid dan kuat. Hal ini dikarenakan BKR bukanlah dimaksudkan sebagai organisasi kemiliteran karena BKR dibentuk atas dasar kerakyatan bukan murni sebagai tentara. Sehingga para anggota militer terus mendesak agar pemerintah segera membentuk suatu angkatan perang guna menjaga keamanan negara dari ancaman tentara Belanda dan NICA. Tetapi politisi sipil yang menjadi pemimpin negara beranggapan angkatan bersenjata bahwa pembentukan tentara nasional justru akan mengundang pasukan gabungan dari sekutu. Sehingga mereka lebih memilih menggunakan jalan diplomasi. Selain itu profesionalisme kemiliteran menurut pandangan dari para politisi sipil masih rendah disamping hanya dimiliki oleh sebagian dari kelompok pemuda dan kelompok bersenjata⁷.

Perubahan nama keorganisasian militer terus terjadi akan tetapi hal ini belum menunjukkan suatu kemajuan akan adanya organisasi militer yang lebih solid dan profesional. Situasi keamanan negara yang semakin mendesak dan dengan adanya tekanan dari para golongan militer, pada akhirnya presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan dekret guna membentuk suatu Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Hasil kerja Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia adalah pada 3 Juni 1947 Presiden RI mengeluarkan Penetapan BN 1947 nomor : 24, Yang isinya adalah TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan perubahan nama ini semua angkatan bersenjata dan biro pertahanan dimasukkan kedalam Tentara Nasional Indonesia⁸. Jadi secara teritorial TNI merupakan gabungan dari kelompok angkatan bersenjata yang bersifat nasional. Tetapi hingga beberapa lama hal ini masih menjadi semacam pergantian nama saja dikarenakan adanya benturan dari aksi-aksi militer Belanda. Perbedaan ideologi tentang cara berjuang merebut kemerdekaan menjadi suatu masalah tersendiri antara para politisi sipil dan

⁶ Bilveer Singh, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-Usul Akulturasi dan Implikasinya bagi Stabilitas Pembangunan*. Singapore: Institute of Internasional Affairs, 1995, hlm. 25-26.

⁷ Soebijono (dkk). *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. 1992. hlm. 12.

⁸ *ibid.* hlm. 15

pejuang militer. Menurut Brigjend Soedibyo posisi yang berbeda antara Pemerintah dan Angkatan bersenjata ini menandai hubungan antara Angkatan bersenjata dengan masyarakat dan Angkatan bersenjata dengan Pemerintah di dalam Negara Republik Indonesia⁹.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia upaya upaya untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah Indonesia terus dilakukan. Selain upaya pengakuan kedaulatan, Pemerintah Indonesia juga mendapatkan ancaman keamanan dari tentara NICA yang berusaha kembali mengasai wilayah Indonesia. Berbagai serangan militer gencar dilakukan tentara oleh NICA memaksa para pemimpin negara mengambil langkah dengan melakukan perundingan-perundingan. Berbagai perundingan dilakukan antara pihak Belanda dan Indonesia juga mendapatkan bantuan dari PBB, dan negara-negara lain. Setelah melalui perundingan-perundingan disepakatilah akan diadakanya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada bulan Agustus 1949.¹⁰ Akan tetapi keputusan mengadakan KMB terdapat sedikit rasa kekecewaan dalam diri pejuang militer dimana pada saat itu sedang terjadi Agresi Militer Belanda II yang memaksa kedua pasukan untuk melakukan gencatan senjata.

Pada 23 Agustus 1949 yang bertempat di Bangsal Ksatria (*Ridderzaal Staten General* Lapangan Binnen Hof, Den Haag. Konferensi yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Belanda, *Bijeenkomst Federaale Overleg* (BFO), dan PBB ini menyepakati akan dibentuknya Negara Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan atas wilayah Negara Indonesia Serikat¹¹. Perubahan konstitusi menjadi negara serikat ini mendapat berbagai tentangan dari masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan sebelumnya.

Didalam RIS selain diberlakukannya konstitusi baru, sesuai dengan isi perjanjian KMB juga disepakati tentang larangan negara bagian untuk memiliki angkatan perang sendiri. Angkatan perang yang ada merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan dari TNI dan mantan Tentara KNIL¹². Situasi ini memunculkan permasalahan baru didalam militer di Indonesia. Ini dikarenakan keengganan para anggota TNI dan KNIL untuk bergabung dalam satu organisasi militer yang sama. Ditambah pula dengan adanya para petinggi-petinggi KNIL yang menolak karena menjadi bawahan karena anggota inti dari APRIS adalah TNI.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RIS yang berdaulat. Mereka memanfaatkan mantan anggota KNIL yang menolak bergabung kedalam APRIS. Pemberontakan terjadi diantaranya di Jawa Barat yang merupakan daerah Negara Pasundan yang dipimpin oleh Westerling. Juga pemberontakan yang dilakukan Andi Aziz yang

⁹ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997 hlm. 73

¹⁰ Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, hlm. 70

¹¹ Mona Lohanda, *Sejarah Peralihan Pemerintah RIS ke RI (Menuju Negara Kesatuan Indonesia)*, Jakarta:Depdikbud, 1896, hlm. 20

¹² Soebijono (dkk). *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. 1992. hlm. 19

merupakan salah satu mantan perwira KNIL. Dan pemberontakan RMS di Maluku oleh Soumakil yang bertujuan keluar dari RIS dan mendirikan negara Republik Maluku Selatan¹³. Dalam pemerintahan RIS militer hanya dijadikan alat sebagai pemangaman negara dari aksi-aksi yang mengancam kedaulatan RIS. Politisi sipil sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan baik dibidang politik bahkan dibidang militer.

Setelah adanya pemberontakan-pemberontakan tersebut keinginan masyarakat Indonesia untuk kembali kedalam bentuk negara NKRI semakin besar. Berbagai aksi menolak pemerintahan RIS dilakukan diberbagai wilayah. Masyarakat menuntut dibubarkannya RIS karena tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan sebelumnya. Diawali dengan adanya pembubaran Negara Pasundan yang membubarkan parlemen dan mengembalikan mandat kepada pemerintah RIS. Kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain dan pada akhirnya negara bagian RIS hanya menyisakan 3 negara yaitu : Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur¹⁴. Dalam upaya pembubaran NST dan NIT terjadi pro-dan kontra dimasyarakat NST dan NIT. Hal ini terjadi karena adanya dua kubu yang mendukung dan ada yang menolak pembubaran negara bagian dan kembali ke NKRI¹⁵. Akan tetapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat memaksa pemerintahan parlemen kedua negara bagian tersebut menyerahkan kuasa kembali kepada pemerintah RIS.

Dengan bubarnya negara-negara bagian RIS maka hanya menyisakan Republik Indonesia sebagai negara bagian yang masih berdiri. Akan tetapi tuntutan agar membubarkan RIS dan kembali ke NKRI mendapatkan masalah. Hal ini terjadi karena kedaulatan yang diakui oleh Belanda dan PBB merupakan kedaulatan RIS, sehingga jika RIS dibubarkan maka kedaulatan yang telah dicapai akan terlikuidasi.¹⁶ Untuk mengatasi masalah ini diambilah suatu kesepakatan bahwa penggabungan RIS ke NKRI bukan lah dengan cara pembubaran RIS, akan tetapi mengubah konstitusi RIS. Jadi secara yuridis NKRI merupakan perubahan dari RIS sebagai negara federal menjadi negara berbentuk kesatuan¹⁷. Pada 17 Agustus 1950 maka secara resmi perjanjian perubahan RIS menjadi NKRI mulai berlaku dengan disahkannya UUDS 50 sebagai dasar konstitusi.

Hubungan sipil-militer pada masa RIS dapat dikatakan terjadi pengendalian sipil atas militer secara subjektif (*Subjective Civilian Control*). Dimana menurut Huntington *subjective civilian control* terjadi jika suatu kekuatan masyarakat dapat mengontrol militer guna memenuhi kepentingan dan tujuan politiknya. Dan hal ini dapat tercapai dengan pentiadaan otonomi pada profesi

¹³ Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan RMS (Gerakan Operasi Militer III)*, Djakarta : Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata 1965

¹⁴ Mc. G. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (terjemahan oleh Nin Bakti Soemanto)*, Solo: UNS Press, 1995, hlm. 449.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ M.T. Mansoer, *Beberapa Aspek Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 51.

¹⁷ Drs. G. Moedjanto, MA. *Indonesia Abad Ke-20 (Dari Perang Kemerdekaan pertama sampai PELITA III, Cetakan 2)*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 72.

militer dan menjadikan militer hanya sebagai alat bagi penguasa politik untuk mencapai tujuan dari kepentingan politik pribadi maupun golongannya¹⁸. Dengan adanya konsep ini maka militer tidak dapat berperan dalam pemerintahan. Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah sipil tidak sesuai dengan yang diharapkan golongan militer. Hal ini berdampak adanya keinginan para petinggi-petinggi militer mulai mencoba agar dapat berperan aktif dalam pemerintahan selain untuk menjaga kedaulatan Indonesia juga agar hak-hak golongan militer tidak terabaikan oleh pemerintah yang dijalankan politisi sipil.

Selain keinginan untuk ikut berperan dalam kelangsungan pemerintahan. Militer juga mulai menunjukkan keinginan untuk membentuk suatu organisasi yang solid dan profesional. Tetapi keinginan untuk ikut serta dalam pemerintahan tidaklah sesuai dengan konsep profesionalisme militer yang diutarakan Huntington. Dimana militer profesional mempunyai tiga karakter atau ciri¹⁹, yaitu:

- 1) Keahlian sebagai karakter utama yang karena keahlian ini profesi militer kian menjadi spesifik serta perlu pengetahuan dan keterampilan. Militer memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk mengorganisasi, merencanakan, dan mengarahkan aktivitasnya, baik dalam kondisi perang maupun damai.
- 2) Militer profesional mempunyai tanggung jawab sosial yang khusus. Selain mempunyai nilai-nilai moral yang harus terpisah sama sekali dari insentif ekonomi, perwira militer mempunyai tanggung jawab kepada negara. Ini berbeda dengan paradigma yang lazim sebelumnya bahwa militer seakan-akan "milik pribadi" komandan dan harus setia kepadanya, yang dikenal dengan sebutan "disiplin mati". Sebaliknya, pada profesionalisme, perwira militer berhak mengontrol dan mengoreksi komandannya, jika komandan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
- 3) Militer profesional memiliki karakter korporasi yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Ketiga ciri militer profesional tersebut melahirkan apa yang disebut oleh Huntington dengan *the military mind*, yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara.

Dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia selanjutnya militer melakukan manuver-manuver untuk dapat ikut berperan aktif dalam pemerintahan. Adanya wacana rasionalisasi dan demobilisasi yang diajukan oleh pemerintah menjadi awal terjadinya pergesekan antara sipil-militer dipemerintahan setelah RIS. Setelah tidak diberlakukannya UUDS 50 dan kembali ke UUD45 menjadi awal dari militer untuk dapat berperan aktif di pemerintahan.²⁰

¹⁸ TIM, *Hubungan Sipil-Militer : Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 7.

¹⁹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politic of Civil-Military Relations*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 1957, hlm. 15-17.

²⁰ TIM, *op.cit*, hlm. 13.

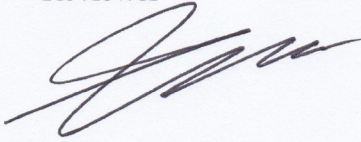
Kesimpulan

Hubungan sipil-militer sudah terjadi di Indonesia sejak awal mula munculnya golongan militer di Indonesia. Embrio Tentara Nasional Indonesia muncul dengan berdirinya BKR. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama pada organisasi militer. Akhirnya untuk mengatasi situasi yang kurang menguntungkan di bidang kemiliteran yang terjadi, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan dekrit guna membentuk suatu Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia beranggotakan 21 orang yang terdiri atas pimpinan bersenjata dan laskar-laskar yang berpengaruh kuat. Hasil kerja Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia adalah pada 3 Juni 1947 Presiden RI mengeluarkan Penetapan BN 1947 nomor : 24, Yang isinya adalah TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembentukan Negara Indonesia Serikat sesuai kesepakatan dalam KMB membawa perubahan didalam tatanan konstitusi Indonesia. Meskipun banyak dari masyarakat Indonesia menolak dengan dibentuknya negara serikat ini, tetapi kedaulatan Indonesia dapat diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda dan PBB. Pembentukan negara serikat juga membawa dampak dibidang militer. Kesepakatan yang tercantum dalam KMB mengharuskan TNI dan mantan anggota KNIL bergabung dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Hal ini tidak dapat diterima oleh beberapa pihak dan membawa ketidak stabilan didalam organisasi militer. Peran militer dalam pemerintahan RIS sangat sedikit, bahkan militer hanya menjadi alat sebagai pengamanan negara dan tidak dilibatkan dalam kelangsungan pemerintahan yang dikuasai politisi sipil. Ketidak stabilan dalam organisasi militer ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang berdaulat.

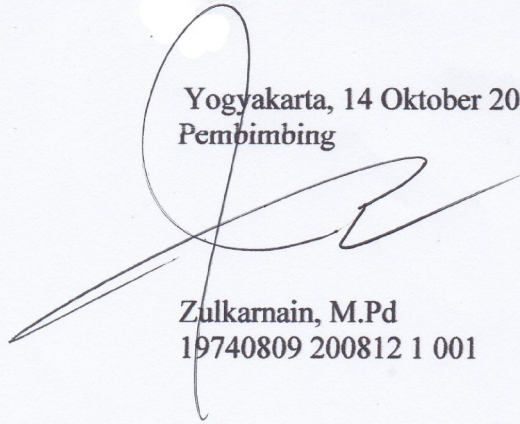
Hubungan sipil-militer yang terjadi pada masa RIS membawa dampak pada kehidupan politik dan militer di Indonesia. Dibidang politik keinginan petinggi-petinggi militer untuk masuk kedalam pemerintahan semakin besar. Karena mereka merasa keputusan-keputusan yang diambil oleh politisi sipil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para anggota militer. Sedangkan dibidang militer sendiri mulai munculnya kesadaran tentang rasa profesionalisme militer guna membangun suatu organisasi yang kuat dan solid.

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd
19741015 200312 1 001

Yogyakarta, 14 Oktober 2015
Pembimbing



Zulkarnain, M.Pd
19740809 200812 1 001

Daftar Pustaka

Arif Yulianto, 2002, *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di tengah Pusaran Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bilveer Singh, 1995, *Dwi Fungsi ABRI: Asal-Usul Akulturasi dan Implikasinya bagi Stabilitas Pembangunan*. Singapore: Institute of Internasional Affairs

Djumarwan, *Relevansi Metodologi antara Ilmu Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Informasi No.2 Th. XXII, Mei 1994*

G. Moedjanto, 1988. *Indonesia Abad Ke-20 (Dari Perang Kemerdekaan pertama sampai PELITA III, Cetakan 2)*, Yogyakarta: Kanisius

Harold Crouch, 1997, *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-Norma dalam Penulisan Sejarah*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan

Nugroho Noto Susanto, 1985, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Mona Lohanda, 1896, *Sejarah Peralihan Pemerintah RIS ke RI (Menuju Negara Kesatuan Indonesia)*, Jakarta: Depdikbud

Mc. G. Kahin, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (terjemahan oleh Nin Bakti Soemanto)*, Solo: UNS Press

M.T. Mansoer, 1977, *Beberapa Aspek Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesi*, Jakarta: Pradnya Paramita

Samuel P. Huntington, 1957, *The Soldier and the State: The Theory and Politic of Civil-Military Relations*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press

Soe Hok Gie, 1965, *Kisah Penumpasan RMS (Gerakan Operasi Militer III)*, Djakarta : Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata

Soebijono (dkk), 1992, *Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

TIM, 1999, *Hubungan Sipil-Militer : Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Grasindo